

SKRIPSI
EVALUASI PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM
PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI AKTIF PADA
PT. BPR DP TASPEN KANTOR CABANG KARAWANG



Disusun Oleh:
SALSABILA LUTHFIANA NURSYIFA
20213048

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN
PROGRAM SARJANA TERAPAN
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
AGUSTUS, 2024

**EVALUASI PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM
PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI AKTIF PADA
PT. BPR DP TASPEN KANTOR CABANG KARAWANG**



**Skripsi ini disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi
Sarjana Terapan**

Disusun Oleh:

SALSABILA LUTHFIANA NURSYIFA

20213048

PROGRAM STUDI ANALISIS KEUANGAN

PROGRAM SARJANA TERAPAN

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

AGUSTUS, 2024

BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN

Bismillahirrahmannirrahim,

Pada Semester Genap 2023/2024, hari Selasa, 20 Agustus 2024, Program Studi Analisis Keuangan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian **PENELITIAN TERAPAN** yang disusun oleh :

Nama : Salsabila Luthfiana Nursyifa
NIM : 20213048
Judul : Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Pegawai Aktif Pada PT BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang
Dosen Pembimbing : Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M.

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian, maka mahasiswa tersebut dinyatakan:

LULUS / ~~TIDAK LULUS~~

Nilai : **A**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M.

Nur Ellyanawati Esty Rahayu, S.E., M.M.

Mengetahui
Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan



Dr. Philo Ningsih Sri Rahayu, S.E., M.M.

BERITA ACARA UJIAN MAGANG

3



BERITA ACARA UJIAN MAGANG

FORM 3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil rapat Panitia Ujian magang pada tanggal : Kamis, 28 Maret 2024 memutuskan bahwa:

UJIAN MAGANG

Dilaksanakan oleh : **Salsabila Luthfiana Nursyifa**

Nomor Mahasiswa : **20213048**

Program Studi : **Analisis Keuangan**

Telah diujikan didepan Tim Penguji dan dinyatakan:

*) LULUS/~~TIDAK LULUS~~

Dengan Nilai: **A**

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dosen Penguji

Rizqi Adhyka Kustumawati, S.E., MBA.

Dosen Pembimbing

Ahmad Rifky Hidayat, S.IP., M.M.

Mengetahui

Universitas Islam Indonesia – Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan

Dr. Phil. Ninik Sri Rahayu, S.E., M.M

Catatan:

*) Coret yang tidak diperlukan

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Pegawai Aktif PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang”** yang disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Skripsi yang sudah dipublikasikan dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 12 Agustus 2024



Salsabila Luthfiana Nursyifa

20213048

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Pegawai Aktif PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang**” disusun untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, dan disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian Skripsi.

Yogyakarta 09 Agustus 2024

Pembimbing



Ahmad Rifqi Hidayat, S. IP., MM
(182131301)

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Phil Ninik Sri Rahayu, S.E., MM
(052130103)

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Pegawai Aktif PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang”, telah dipertahankan dalam ujian wawancara dan diterima sebagai syarat untuk menjadi Sarjana Terapan Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 22 Agustus 2024

Tim penguji

Penguji 1



Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP.,MM
(182131301)

Penguji 2



Nur Ellyanawati E R, S.E., MM
(162131301)

Mengesahkan

Ketua Program Studi



D. Ph. Nuzul Sri Rahayu, S.E., MM

(052130103)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan bahagia, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan yang memiliki arti penting dalam hidup saya:

1. Orang Tua Tercinta

Papa dan Mama, yang selalu memberikan doa, dukungan kasih sayang, dan semangat tiada henti. Terima kasih atas pengorbanan dan cinta yang kalian berikan sepanjang hidup saya.

2. Keluarga Tersayang

Kakak (Aa) yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan motivasi di setiap langkah saya. Terima kasih telah menjadi sumber inspirasi dan semangat.

3. Partner Spesial

Ananta Dwi Sasongko, yang selalu menjadi sosok pendamping dalam segala hal. Terima kasih atas kesabaran dan pengertiannya.

4. Teman Seperjuangan

Vallindya Jasmine, Dina Mutiara Oktafiani, Ameilya Mutiara Prihatin, Ismi Rizki Mulyani yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan keceriaan selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dan memberikan semangat tak kenal lelah.

5. Teman Rumah

Syahda Azari Mahari dan Aulia Putri Awaln Sabani yang walaupun sosok mereka tidak pernah ada disamping penulis selama mengerjakan skripsi tetapi mereka selalu memberikan dukungan penuh melalui pesan dan kata-kata yang membangunkan semangat untuk penulis. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik dari semasa sekolah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Pegawai Aktif Pada PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang”** ini dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam program studi Analisis Keuangan, Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam proses pemberian kredit kepada pegawai aktif ASN pada BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas penerapan prinsip – prinsip tersebut dalam mengurangi risiko kredit serta meningkatkan kualitas pemberian kredit di BPR tersebut.

Penyusunan penelitian ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Ahmad Rifqi Hidayat, S. IP., MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini.
2. Seluruh staf dan karyawan BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
3. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan penuh moral dan material.
4. Teman – teman dan rekan – rekan yang turut memberikan semangat dan bantuan selama proses penelitian ini berlangsung.

Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan

saran yang membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan dan keuangan.

Yogyakarta , 09 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salsabila'.

Salsabila Luthfiana Nursyifa

DAFTAR ISI

BERITA ACARA UJIAN PENELITIAN TERAPAN	ii
BERITA ACARA UJIAN MAGANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Bank.....	7
2.2.1 Pengertian Bank	7
2.2.2 Jenis-jenis Bank	8
2.2.3 Fungsi Bank	10
2.3 Kredit	11
2.3.1 Pengertian Kredit	11
2.3.2 Prinsip Pemberian Kredit	11
2.4 Risiko Kredit	13
2.4.1 Pengertian Risiko Kredit	13
2.4.2 Faktor-Faktor Risiko Kredit	13
2.4.3 Dampak Risiko Kredit.....	13
2.5 Ketaspenan	14
2.5.1 Pengertian Taspen	14

BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Pendekatan Penelitian	15
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	15
3.3 Desain Penelitian	15
3.4 Sumber Data	16
3.5 Teknik Pengumpulan Data	16
3.6 Teknik Keabsahan Data	17
3.7 Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Data Umum	20
4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan	20
4.1.2 Visi dan Misi PT BPR DP Taspen	21
4.1.3 Struktur Organisasi	21
4.1.4 Tata Kelola	22
4.1.5 Produk dan Layanan	23
4.2 Data Khusus	23
4.2.1 Kredit Pegawai Aktif	23
4.2.5 Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit	26
BAB V PENUTUP	28
5.1 Kesimpulan	28
5.2 Implikasi	29
5.2.1 Implikasi Teoritis	29
5.2.2 Implikasi Praktis	30
5.3 Keterbatasan Penelitian	30
5.4 Rekomendasi Untuk Peneliti Berikutnya	31
DAFTAR PUSTAKA	32
INSTRUMEN PENELITIAN	35
SURAT KETERANGAN RISET	63
SURAT KETERANGAN HASIL PINDAI UJI KEMIRIPAN NASKAH	64
RIWAYAT HIDUP	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo Perusahaan.....	20
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	22
Gambar 4.3 Alur Pemberian Kredit Pegawai Aktif	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Dokumentasi	66
--------------------------------	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) dalam pemberian kredit pegawai aktif pada PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana prosedur pemberian kredit diterapkan dan untuk mengidentifikasi aspek dari prinsip 5C yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat pegawai BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang dan melalui analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pada BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang sudah sesuai dengan prinsip 5C, namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam penelitian karakter dan agunan atau collateral. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa ketidakmampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan perubahan kondisi ekonomi makro merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya risiko kredit.

Kata kunci : Evaluasi Kredit ; Prinsip 5C ; Kredit Pegawai Aktif

ABSTRACT

This research aims to evaluate the application of the 5C principles (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) in providing credit to active employees at PT. BPR DP Taspen Karawang Branch Office. The main focus of this research is to understand how credit granting procedures are implemented and to identify aspects of the 5C principles that need to be improved or adjusted to improve the quality of credit granting. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. Data was collected through in-depth interviews with four employees of BPR DP Taspen Karawang Branch Office and through analysis of related documents. The research results show that the procedures for granting credit at the BPR DP Taspen Karawang Branch Office are in accordance with the 5C principles, but there are several aspects that need to be improved, especially in character research and collateral. This research also identifies that customers' inability to manage finances and changes in macroeconomic conditions are the main factors that cause credit risk.

Keyword : Credit Evaluation ; Principle 5C ; Active Employee Credit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman sekarang kebutuhan finansial di kalangan masyarakat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia semakin meningkat. Hal ini, disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang mencari penghasilan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan modal yang cukup besar untuk memulai usaha yang melibatkan berbagai aspek kehidupan dan tidak terlepas dari transaksi perbankan (Alamri et al., 2023). Menurut peraturan perundang-undangan perbankan, bank adalah entitas usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mendistribusikannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam melaksanakan tugasnya, bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai modal utama. Kepercayaan ini dapat diperoleh melalui upaya menjaga kesehatan bank. Sebuah bank dianggap sehat jika mampu menjalankan perannya dengan baik, yaitu bank yang dapat mendukung kelancaran sistem pembayaran dan fungsi intermediasi keuangan, serta dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan moneter.

Salah satu aspek vital dalam industri ini adalah pemberian kredit kepada nasabah. Memberikan pinjaman adalah salah satu inti bisnis bank yang dapat memberikan keuntungan terbesar. Namun perlu diakui bahwa pinjaman juga membawa risiko tinggi bagi kesehatan keuangan bank jika tidak dikelola dengan baik. Pemberian pinjaman merupakan kegiatan pokok bank, sehingga sebagian besar aset bank diinvestasikan dalam bentuk kredit (Basori & Wahyuningsih, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa perbankan terbagi menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan

Rakyat didefinisikan sebagai bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran artinya pelayanan yang diberikan BPR jauh lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan bank umum, baik secara konvensional maupun syariah. Jika berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) saat memberikan kredit kepada masyarakat, mereka dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat dengan bank-bank lainnya. Setiap BPR berusaha untuk memikat hati masyarakat dengan berbagai strategi, seperti menyajikan syarat kredit yang lebih mudah dan prosedur yang lebih sederhana, penawaran kredit tanpa agunan, bunga yang kompetitif dan berbagai metode lainnya (Mutiarawati, 2018).

BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang turut menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit. Beragam produk yang ditawarkan oleh BPR DP Taspen salah satunya yaitu Kredit Pegawai Aktif. Kredit Pegawai Aktif adalah kredit yang dapat diajukan oleh para pegawai aktif ASN. Produk ini mengalami kendala dalam penyaluran pembiayaan kepada calon nasabah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan nasabah yang tidak melunasi pembiayaan kreditnya. Dalam rangka memastikan kualitas kredit yang diberikan dan mengurangi risiko kredit macet, penerapan prinsip 5C menjadi sangat krusial, penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit perlu dievaluasi secara berkala. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan yang diterapkan masih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan dan risiko yang ada.

Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit pegawai aktif ASN di PT. BPR DP Taspen KC Karawang. Dengan melakukan evaluasi ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai aspek yang perlu diperbaiki atau disempurnakan, sehingga proses pemberian kredit dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Mengacu hal tersebut penulis tertarik mengambil judul **“EVALUASI PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN KREDIT PEGAWAI AKTIF PADA PT. BPR DP TASPEN KC KARAWANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah seperti berikut:

- 1) Bagaimana prosedur pemberian Kredit Pegawai Aktif pada PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang?
- 2) Apakah ada aspek dari prinsip 5C yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit?

1.3 Tujuan

- 1) Untuk menjelaskan prosedur pemberian Kredit Pegawai Aktif pada PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang.
- 2) Untuk mengidentifikasi aspek-aspek dari prinsip 5C yang perlu diperbaiki atau disesuaikan guna meningkatkan kualitas pemberian kredit.

1.4 Manfaat

- 1) Untuk meningkatkan pemahaman umum mengenai pentingnya evaluasi prinsip 5C dalam menjaga kesehatan finansial bank.
- 2) Untuk membantu bank dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam penerapan prinsip 5C.
- 3) Untuk memberikan kontribusi kepada literatur ilmiah mengenai penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada studi atau riset yang sudah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik atau isu yang sedang diteliti. Penelitian-penelitian ini digunakan sebagai refensi untuk memahami perkembangan pengetahuan dalam suatu bidang, menemukan celah atau keterbatasan dalam penelitian sebelumnya, dan membangun landasan teori atau kerangka kerja untuk penelitian yang sedang dilakukan. Dengan demikian memilih penelitian diantaranya:

Tahun	Nama	Judul	Hasil penelitian
2023	RIKA ARI APRITA (Aprita, 2023)	Implementasi Analisis Prinsip 5C (Studi Pada KPPS Bina Mitra Wahan Rahmah Jatim Kediri) Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan	KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim telah mampu mengimplementasi prinsip analisis pembiayaan dalam mitigasi risiko pembiayaan dengan cara menggunakan analisis 5C secara keseluruhan. Dari implementasi analisis prinsip 5C dalam mitigasi risiko pembiayaan saat ini terbukti dapat menurunkan presentase Non Performing Finance (NPF)
2023	Yanaski Adiyola (Adiyola, 2023)	Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Pada Prosedur	Sistem pemberian kredit Kupedes di PT Bank Rakyat Indonesia

		Pemberian Kredit Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Solo Slamet Riyadi	(Persero) Tbk Unit Laweyan sudah menerapkan prinsip 5C dengan sesuai, yaitu didalam prosedur sudah memuat sistem pemberian kredit Kupedes dalam melakukan penilaian, antara lain: karakter debitur, kemampuan debitur dapat melunasi pinjaman, modal yang dimiliki debitur, agunan yang diserahkan debitur, dan kondisi ekonomi debitur.
2022	Wenny Djuarni, Rita Ratnasari (Djuarni & Ratnasari, 2022)	Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah	PT BPR Kerta Raharja dalam tahap proses implementasi prinsip 5C dalam pemberian Kredit Multiguna telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip yang dilakukan bank sebelum suatu fasilitas kredit diberikan dimana bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Perkembangan NPL pada tahun 2021 mengalami

			fluktuasi yaitu dari bulan Januari hingga Oktober rata-ratanya menunjukkan kurang dari 5%.
2017	Wahyuni, Niniek (Wahyuni, 2017)	Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam proses pemberian kredit oleh bank sangat penting untuk mengurangi risiko kredit macet. Penelitian ini menekankan bahwa analisis mendalam terhadap karakter, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha debitur harus dilakukan sebelum kredit diberikan.
2022	Suardewi, Ni Kadek Aprilia (Suardewi, 2022)	Analisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah Di PT BPD Bali Cabang Klungkung.	Penelitian kredit pada PT BPD Bali cabang Klungkung berdasarkan prinsip 5C dan 7P telah dilakukan sepenuhnya. Kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip 5C dan 7P adalah tidak semua informasi yang diinginkan bank dapat disediakan debitur.

Kesimpulan dari lima kajian pustaka yang telah dianalisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conditions) dalam proses pemberian kredit sangat krusial untuk meningkatkan kelayakan kredit dan meminimalkan risiko kredit bermasalah. Semua penelitian sepakat bahwa penerapan prinsip 5C secara menyeluruh membantu bank dan lembaga keuangan dalam melakukan analisis mendalam terhadap debitur, sehingga mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Namun, terdapat kendala dalam implementasinya, terutama dalam penyediaan informasi yang diperlukan oleh bank dari debitur, yang dapat mempengaruhi keputusan pemberian kredit.

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C yang baik dapat membantu lembaga keuangan menjaga kualitas kredit, seperti yang tercermin dari fluktuasi Non Performing Loan (NPL) yang tetap rendah. Lebih lanjut, implementasi prinsip 5C turut berperan dalam mitigasi risiko pembiayaan, yang terbukti menurunkan persentase Non Performing Finance (NPF) di beberapa lembaga keuangan. Sebagai contoh, penerapan prinsip 5C dalam prosedur pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia menegaskan bahwa penilaian yang komprehensif terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan kondisi ekonomi debitur sangat penting untuk menjamin keberhasilan pemberian kredit.

Secara keseluruhan, kajian pustaka ini menekankan bahwa penerapan prinsip 5C yang konsisten dan efektif dapat meningkatkan kualitas keputusan kredit dan mengurangi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Secara tradisional, fungsi bank didefinisikan sebagai lembaga perantara yang bertindak sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana (penabung) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Umumnya, ada pandangan bahwa bank dibiayai oleh nasabah penyimpan, nasabah peminjam

dan nasabah pengguna layanan bank lainnya. Namun, jika dipertimbangkan lebih lanjut, terdapat dua kelompok yang mendukung eksistensi bank yaitu pihak atau kelompok yang disebut sebagai *surplus spending units* dan *deficit spending units* (Rahmayeli & Marlius, 2017). Bank sebagai institusi keuangan umumnya didirikan atas izin perusahaan untuk menerima deposito dan memberikan pinjaman, serta memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (Putra, 2017).

2.2.2 Jenis-jenis Bank

Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 1967. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak mengalami perubahan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari fungsi bank dan kepemilikan bank. Secara fungsi, perbedaan tersebut terletak pada jumlah produk yang ditawarkan dan jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan, kepemilikan perusahaan dapat dilihat dari pemilikan saham yang ada dan akte pendiriannya. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari nasabah yang dilayani, apakah masyarakat umum atau masyarakat di wilayah tertentu seperti kecamatan. Undang-Undang Pokok Perbankan No. 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:

- a) Bank Umum
- b) Bank Pembangunan
- c) Bank Tabungan
- d) Bank Pasar
- e) Bank Desa
- f) Lumbung Desa
- g) Bank Pegawai

Berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 serta ditegaskan dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun

1998, maka jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Fadlan, 2022).

1. Bank Umum

Bank umum adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan perbankan kepada masyarakat luas. Layanan yang disediakan oleh bank umum mencakup penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito serta penyaluran dana tersebut melalui berbagai jenis pinjaman atau kredit. Selain itu, bank umum juga menyediakan layanan jasa keuangan lainnya seperti transfer uang, pembayaran tagihan, penyimpanan barang berharga, dan layanan kartu kredit serta debit. Bank umum berperan penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara dengan menyediakan fasilitas keuangan yang memudahkan transaksi dan investasi. Bank umum dapat didirikan dan dijalankan dengan izin dari Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan pendapat Bank Indonesia. Bank ini dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, atau melalui kerja sama antara warga negara Indonesia, dan badan hukum Indonesia dengan bank yang berkedudukan di luar negeri (Sumual, 2016).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lain yang dianggap setara. Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998, kegiatan Bank Perkreditan Rakyat melibatkan:

- a) Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang dianggap setara.
- b) Penyediaan kredit atau penyalurannya kembali kepada masyarakat.
- c) Memberikan pembiayaan dan menempatkan dana berdasarkan prinsip syariah dengan skema bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

- d) Menanamkan dana nya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan di bank lain.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki kemampuan untuk memberikan layanan jasa dan menyediakan pinjaman kepada masyarakat dari berbagai lapisan, baik yang berada di kategori ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Kegiatan perkreditan merupakan salah satu aktivitas utama dalam dunia perbankan karena sebagian besar pendapatan berasal dari sektor kredit (Sukma et al., 2017).

2.2.3 Fungsi Bank

Bank memiliki peran penting dalam perekonomian dengan berbagai fungsi yang mereka jalankan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank:

- a) Penghimpun Dana (Fungsi Intermediasi):

Bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito. Dana yang terkumpul ini kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

- b) Penyaluran Kredit:

Bank menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada individu, bisnis, atau pemerintah dalam bentuk pinjaman atau kredit. Penyaluran kredit ini mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memberikan modal kepada pelaku usaha untuk berinvestasi atau menjalankan kegiatan bisnis.

- c) Penyedia Jasa Pembayaran:

Bank menyediakan berbagai layanan pembayaran, seperti transfer dana, penerbitan cek, kartu debit/kredit, dan sistem pembayaran elektronik lainnya. Layanan ini memudahkan transaksi keuangan dan perdagangan baik dalam negeri maupun internasional.

- d) Pengelolaan Risiko Keuangan:

Bank menawarkan berbagai produk keuangan, seperti asuransi dan instrumen derivatif, yang membantu individu dan perusahaan dalam mengelola risiko keuangan. Produk-produk ini dirancang untuk melindungi dari risiko seperti fluktuasi suku bunga, perubahan nilai tukar, dan risiko kredit.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Berdasarkan pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa “kredit adalah pemberian uang atau tagihan yang dianggap setara dengan uang, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjaman antara bank dan pihak lain yang mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi pinjamannya setara periode waktu tertentu dengan pembayaran bunga” (Kosasih & SH, 2021). Bagi masyarakat, kredit memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung dan memperluas usahanya. Dengan menggunakan dana kredit, mereka dapat menambah atau meningkatkan berbagai faktor produksi, seperti modal kerja tambahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan aspek lainnya (Baiya, 2019).

2.3.2 Prinsip Pemberian Kredit

Pemberian kredit yang didasarkan pada prinsip 5C menjadi standar atau panduan yang mencerminkan stabilitas suatu bank, dengan tujuan agar kredit yang diberikan tidak mengalami masalah atau kredit macet. Oleh karena itu, penting untuk menilai dengan cermat prinsip dasar dalam pemberian kredit, yang dikenal sebagai prinsip 5C dalam dunia perbankan (Guntara & Griadhi, 2019). Hal yang perlu diperhatikan saat menganalisis kredit adalah bahwa nasabah harus memenuhi prinsip 5C yaitu sebagai berikut:

a) Character (Karakter)

Prinsip ini mencakup keyakinan bahwa sifat atau karakter dari pihak yang mengajukan kredit harus dapat dipercaya. Ini tercermin dalam latar

belakang debitur, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun aspek pribadi, seperti gaya hidup, kondisi keluarga, kebiasaan, dan status sosialnya.

b) Capacity (Kemampuan)

Menilai kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Ini melibatkan analisis cash flow, rasio keuangan dan kapasitas ekonomi nasabah.

c) Capital (Modal)

Dalam mengevaluasi prinsip ini, perhatian diberikan pada efektivitas penggunaan modal, yang dinilai dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Evaluasi melibatkan pengukuran aspek likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan faktor ukuran lainnya. Selain itu, sumber modal yang tersedia saat ini juga menjadi perhatian.

d) Condition (Kondisi)

Menilai kondisi ekonomi dan bisnis yang dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar kembali kredit. Faktor ini mencakup perubahan ekonomi, kebijakan suku bunga, dan stabilitas pasar.

e) Collateral (Agunan)

Melibatkan aset atau jaminan yang diambil oleh bank jika nasabah gagal membayar kredit. Ini merupakan langkah untuk mengurangi risiko perbankan.

Penerapan prinsip 5C bertujuan untuk melindungi pihak bank dari risiko debitur yang kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajibannya, seperti mengalami wanprestasi yang mengakibatkan kredit bermasalah. Kredit bermasalah merujuk pada kredit yang tidak lancar, dipertanyakan atau macet. Keadaan ini bisa mengganggu proses pengembalian kredit sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Istilah kredit bermasalah telah dikenal dalam konteks Perbankan Indonesia sebagai versi dari “*problem loan*” yang merupakan terminologi yang umum digunakan secara internasional (Guntara & Griadhi, 2019).

2.4 Risiko Kredit

2.4.1 Pengertian Risiko Kredit

Risiko kredit sering disebut sebagai risiko gagal bayar adalah risiko yang timbul akibat ketidakmampuan atau kegagalan nasabah dalam mengembalikan pinjaman yang diterima dari perusahaan beserta bunga yang telah ditetapkan dalam jangka waktu yang disepakati. Risiko kredit muncul karena adanya kemungkinan pinjaman tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran (Mosey et al., 2018). Risiko kredit yang harus ditanggung oleh bank dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi bank untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga berdampak negatif terhadap profitabilitas perbankan (Rahmi, 2014).

2.4.2 Faktor-Faktor Risiko Kredit

Faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kredit meliputi ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tepat waktu, yang bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan atau masalah keuangan lainnya. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi makro seperti resesi, inflasi tinggi, atau kenaikan suku bunga yang signifikan juga dapat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman. Kelemahan dalam manajemen internal bank, seperti proses analisis kredit yang kurang tepat, penilaian risiko yang tidak akurat, atau kebijakan manajemen kredit yang tidak efektif, dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko kredit.

2.4.3 Dampak Risiko Kredit

Dampak dari risiko kredit dapat sangat signifikan bagi lembaga keuangan. Ketika terjadi risiko kredit, yaitu ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman, bank akan mengalami kerugian finansial yang langsung memengaruhi profitabilitasnya. Kerugian ini dapat muncul dalam bentuk non-performing loan (NPL), yang tidak hanya mengurangi pendapatan bunga yang seharusnya diterima oleh bank, tetapi juga

meningkatkan biaya operasional karena bankk harus mengalokasikan lebih banyaj sumber daya untuk penagihan, restrukturisasi kredit atau penjualan agunan. Selain itu risiko kredit yang tinggi juga dapat menurunkan kepercayaan investor dan kreditor terhadap bank, yang berpotensi memengaruhi likuiditas dan stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk menerapkan manajemen risiko kredit yang efektif guna meminimalkan dampak negatif tersebut.

2.5 Ketaspenan

2.5.1 Pengertian Taspen

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 disebutkan bahwa Dana Pensiunan adalah entitas hukum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program yang memberikan jaminan manfaat pensiun bagi pesertanya. Dana pensiun menjadi sebuah entitas atau organisasi yang secara sah didirikan dan beroperasi untuk mengelola program pensiun, khususnya untuk kesejahteraan karyawan perusahaan, terutama mereka yang sudah memasuki masa pensiun (Masrohatin et al., 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan dinamis terkait dengan penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit pegawai aktif ASN di PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif, di sisi lain, adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau area tertentu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang lebih jelas dan lengkap, serta memudahkan peneliti dalam melakukan observasi. Penelitian ini dilakukan di PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang, sebuah lembaga perbankan yang turut menyalurkan dana nya ke masyarakat dalam bentuk kredit. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi dan keterjangkauannya dalam mengakses data yang diperlukan. Penelitian ini dilaksanakan pada saat magang di perusahaan tersebut, dimulai pada bulan September 2023 hingga bulan Maret 2024.

3.3 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap penerapan prinsip 5C di PT. BPR Taspen Kantor Cabang Karawang. Melalui desain ini, peneliti dapat memahami bagaimana prinsip 5C diterapkan dalam konteks nyata, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalannya. Dalam studi kasus dengan penelitian kualitatif ini, diperlukan pendekatan yang mendalam dan menyeluruh terhadap kasus tertentu. Hal ini mencakup proses yang akan dijalankan, informasi mengenai cara pengumpulan sampel jika diperlukan survei primer, ukuran sampel, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, serta prosedur teknis penelitian lainnya (Nasution, 2023).

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

- 1) Data Primer: Data primer adalah data internal yang diperoleh langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan secara langsung dan metode lainnya (Siregar et al., 2022). Data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Narasumber utama adalah pegawai PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang yang terlibat dalam proses pemberian kredit.
- 2) Data Sekunder: Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari dokumen perusahaan, bahan bacaan seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian. Data disebut sebagai data sekunder jika diperoleh bukan dari sumber asli atau sumber pertama, melainkan merupakan hasil penyajian dari pihak lain (Wahidmurni, 2017).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data penulis terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Wawancara Mendalam: Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Wawancara adalah proses tatap muka yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh informasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini melibatkan pertanyaan yang umumnya tidak terstruktur dan bersifat terbuka, dengan tujuan menggali informasi secara mendalam dari pihak atau masalah yang

diteliti (Bali & Darma, 2019). Penulis melakukan wawancara dengan pegawai PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang yaitu kepada dua orang staff *Account Officer*, Assisten Manajer Operasional, serta *Branch Manager*. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai penerapan prinsip 5C dan pengalaman praktis dalam proses pemberian kredit.

- 2) Observasi Partisipatif: Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan sehari-hari di PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang, terutama terkait dengan proses pemberian kredit. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang diterapkan serta dinamika yang terjadi di lapangan.
- 3) Dokumentasi: Analisis dokumen-dokumen perusahaan, seperti sejarah singkat bank, visi dan misi bank, struktur organisasi, kebijakan kredit, dan dokumen terkait lainnya untuk memahami lebih lanjut penerapan prinsip 5C dan data pendukung lainnya.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data adalah standar kebenaran data hasil penelitian yang lebih menekankan pada validitas data atau informasi dibandingkan dengan sikap dan jumlah orang (Octaviani & Sutriani, 2019). Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan valid. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data dengan menggunakan berbagai sumber data atau metode. Teknik keabsahan data triangulasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan validitas dan kendalan data yang diperoleh. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data, metode teori atau penelitian yang berbeda untuk memeriksa konsistensi temuan dalam penelitian.

Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk meminimalkan bias dan memperkuat validitas hasil penelitian. Dengan membandingkan data dari berbagai sumber atau perspektif, peneliti dapat memperoleh gambaran yang

lebih komprehensif dan meyakinkan tentang fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Triangulasi Sumber: Menggunakan berbagai sumber data yang berbeda seperti wawancara dengan responden yang berbeda, dokumen dan observasi untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti *account officer*, asisten manajer operasional serta *branch manager*.
- 2) Triangulasi Metode: Menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data seperti wawancara mendalam, survei dan observasi untuk memastikan validitas data yang dikumpulkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan proses yang lebih fleksibel dan interpretatif di bandingkan dengan penelitian kuantitatif. Teknik analisis data adalah usaha untuk memperoleh dan mengubah sistem data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber lainnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami kasus yang sedang diteliti dan menyampaikan temuan untuk penelitian di masa mendatang (Ahmad & Muslimah, 2021). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Reduksi Data adalah proses memilih, memfokuskan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “mentah” yang berasal dari catatan lapangan. Proses ini dimulai sejak pengumpulan data, mencakup pembuatan ringkasan, penulisan memo, dan kegiatan lainnya untuk menyaring data atau informasi yang tidak relevan, sehingga data yang diperoleh dapat diverifikasi.
- 2) Penyajian Data adalah proses mendeskripsikan sekumpulan informasi yang terorganisir, memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, yang dirancang untuk menyusun informasi secara terpadu dan mudah dipahami.

- 3) Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dari analisis data, yang melibatkan interpretasi untuk menemukan makna dari data yang telah disajikan. Aktivitas ini terkait erat dengan penyajian data, di mana analisis data berlangsung secara terus-menerus dan berulang. Proses analisis data kualitatif melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara berurutan. Data yang telah dianalisis kemudian dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan fakta di lapangan atau menjawab pertanyaan penelitian, kemudian diambil intisarnya. Setiap tahap dalam proses ini dilakukan untuk memastikan keabsahan data, dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar/foto yang didukung oleh studi dokumentasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

4.1.1 Sejarah dan Profil Perusahaan

Gambar 4.1 Logo Perusahaan



(Sumber: BPR DP Taspen KC Karawang, 2023)

PT. BPR DP Taspen didirikan pada tanggal 18 Januari 1990. Berdasarkan Anggaran Dasar PT. BPR Purnaloka Bhakti Nomor: 20/PT/01/90 tanggal 25 Januari 1990, perusahaan ini mengalami perubahan terakhir yang tercantum dalam akta Notaris Nomor: 27 tanggal 13 Januari 2010 oleh Notaris Petrus Suandi Halim, SH. tentang perubahan anggaran dasar perseroan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-06044.AH.01.02 tahun 2010 pada tanggal 4 Februari 2010, sehingga pada tanggal 13 Januari 2010, nama perusahaan berubah menjadi PT. BPR DP Taspen.

BPR DP Taspen terus berusaha memainkan perannya sebagai solusi strategis untuk turut meraih asa yang digantungkan bagi karyawan. Dana pensiun hadir untuk memberikan harapan melalui kemampuan dan potensi sumber daya dalam upaya mensejahterakan karyawan. BPR DP Taspen

berharap dapat selalu menjadi penyedia dana pensiun yang sehat, terpercaya, dan dapat memenuhi kewajibannya.

4.1.2 Visi dan Misi PT BPR DP Taspen

Adapun Visi dan Misi nya ialah sebagai berikut:

1. Visi

Menjadi BPR terpercaya dengan layanan andal dan tumbuh dengan konsisten.

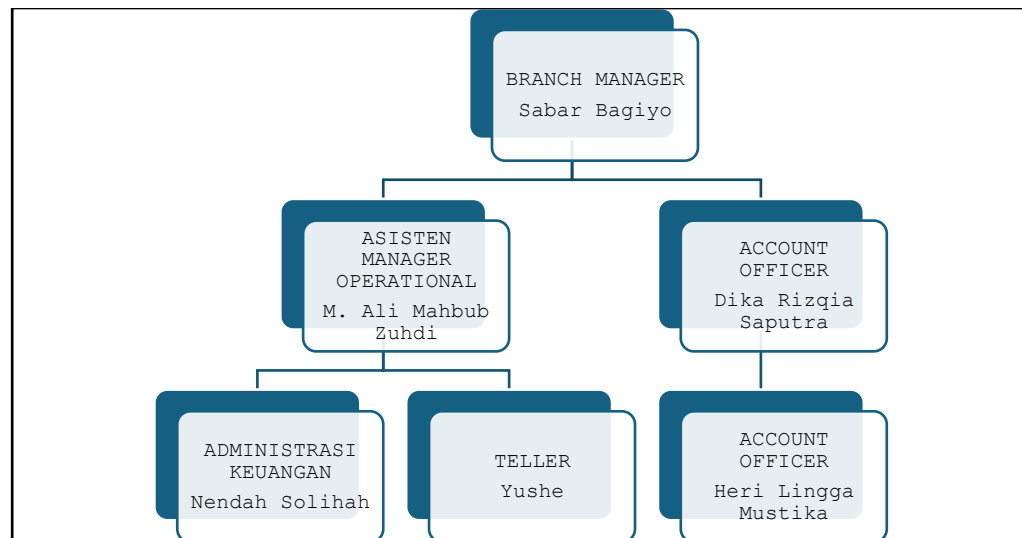
2. Misi

- a) Menjalankan fungsi mediasi perbankan dengan jujur, beretika, profesional dan prudent.
- b) Mewujudkan janji dan memenuhi kewajiban kepada semua nasabah yang menempatkan dana di BPR DP Taspen.
- c) Memberikan solusi pendanaan bagi masyarakat yang membutuhkan berdasarkan praktek perbankan yang sehat.
- d) Melakukan pengembangan serta pertumbuhan bank secara berkelanjutan, sesuai dengan harapan pemegang saham.
- e) Berpartisipasi dalam membangun ekonomi kerakyatan.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan



(Sumber: PT. BPR DP Taspen KC Karawang, 2023)

4.1.4 Tata Kelola

- a) Branch Manager adalah pejabat struktural yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi, bertugas dan bertanggung jawab kepada Direksi untuk memimpin, mengelola melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di Kantor Cabang sesuai kebijakan-kebijakan Direksi PT BPR DP Taspen dan ketentuan lainnya yang berlaku.
- b) Asisten Manajer Operasional (AMO) Kantor Cabang adalah pejabat struktural yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur Utama, yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Manajer Operasional, dalam pelaksanaan operasional di Kantor Pusat Operasional.
- c) Staff Account Officer adalah pelaksana yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab kepada Asisten Manajer Bisnis atau Branch Manager atau kepada Kepala Kantor Kas untuk melaksanakan tugas pemasaran kredit, pemasaran deposito, penambahan pensiunan, penagihan, serta pengumpulan persyaratan klaim AJK dari ahli waris.
- d) Staff administrasi Keuangan Kantor Cabang adalah pelaksana yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab

kepada AMO di kantor cabang untuk melaksanakan tugas pembukuan (akutansi), menyusun Laporan Keuangan dan pajak serta melaporkan kepada Kantor Pajak.

- e) Teller adalah pelaksana yang ditunjuk dan diangkat oleh Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab kepada AMO KPO atau AMO Kantor Cabang atau Kepala Kantor Kas untuk melaksanakan tugas transaksi pengeluaran dan penerimaan kas.

4.1.5 Produk dan Layanan

Produk dan layanan yang ditawarkan pada PT BPR DP Taspen yaitu:

1. Kredit
 - a) Kredit Pegawai Aktif
 - b) Kredit Pensiun Regular
 - c) Kredit Pensiun Platinum
 - d) Kredit Pensiun Platinum Plus
 - e) Kredit Wiraswasta
 - f) Kredit Jande
2. Produk Tabungan
 - a) Tabungan Umum
 - b) Tabungan Pensiun
 - c) Tabungan SimPel
 - d) Tabungan Friend
3. Produk Deposito
4. Layanan
 - a) Pengurusan Klim Pensiun ke Taspen
 - b) Pembayaran Uang Pensiun

4.2 Data Khusus

4.2.1 Kredit Pegawai Aktif

Kredit Pegawai Aktif adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan aktif pada suatu

perusahaan atau instansi, seperti PT. TASPEN (Persero). Kredit ini memiliki suku bunga yang kompetitif serta menawarkan jumlah pinjaman dan jangka waktu yang fleksibel, disesuaikan dengan kemampuan dan gaji masing-masing karyawan. Tujuan dari kredit ini adalah untuk memberikan bantuan finansial kepada pegawai yang masih aktif bekerja, sehingga mereka dapat memenuhi berbagai kebutuhan tanpa harus menghadapi beban keuangan yang berat.

Adapun persyaratan pemberian Kredit Pegawai Aktif ASN, sebagai berikut:

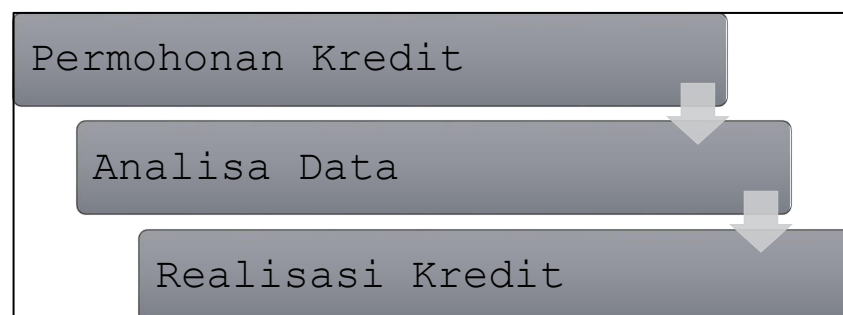
Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam pengajuan kredit antara lain:

- a) Fotokopi KTP suami dan istri
- b) Fotokopi KK
- c) Fotokopi NPWP
- d) Slip gaji
- e) Jaminan asli (SK 80%, SK 100%, SK Pangkat Terakhir)

Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Aktif pada BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang, antara lain:

Pada bagian ini, membahas prosedur pemberian kredit pegawai aktif di BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang. Berdasarkan hasil wawancara kepada *staff account officer 1*, prosedur pemberian kredit meliputi beberapa tahap yang saling berkaitan dan berkesinambungan :

Gambar 4.3 Alur Pemberian Kredit Pegawai Aktif



(Sumber : PT. BPR DP Taspen KC Karawang, 2024)

a. Permohonan Kredit

Tahap pertama dalam proses permohonan kredit adalah pengumpulan berkas kredit, yang mencakup informasi dasar mengenai identitas, tujuan pinjaman, jumlah pinjaman yang diinginkan, dan rencana penggunaan dana. Setelah itu, nasabah harus mengumpulkan dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh bank, seperti fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi NPWP, SK asli Pangkat Terakhir, SK asli 80%, SK asli 100%, slip gaji terbaru. Petugas bank kemudian memeriksa semua dokumen yang diserahkan untuk memastikan keaslian dan kelengkapannya, guna mengidentifikasi dan mencegah penipuan serta memastikan bahwa calon nasabah memenuhi persyaratan dasar untuk mengajukan kredit. Setelah semua dokumen terkumpul dan diverifikasi, petugas bank memberikan informasi mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengajuan kredit kepada nasabah, termasuk proses verifikasi lebih lanjut, pemeriksaan BI Checking, dan verifikasi status flagging.

b. Analisa Kredit

Pada tahap analisa kredit, bank melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan calon nasabah berdasarkan informasi dan dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Proses ini dimulai dengan pengecekan BI Checking untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki catatan buruk atau kredit bermasalah di bank lain. Selanjutnya, bank menilai 5 aspek utama dari calon nasabah, yaitu prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition)

c. Realisasi Kredit

Tahap realisasi kredit merupakan tahap akhir dalam proses pemberian kredit di mana dana pinjaman disalurkan kepada nasabah setelah semua persyaratan dan verifikasi terpenuhi. Setelah komite kredit memberikan persetujuan atas pengajuan kredit, AO (*Account Officer*) menjelaskan syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jadwal angsuran, suku bunga, dan biaya terkait lainnya. Pada tahap ini, AO memastikan bahwa nasabah

memahami semua ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kredit. Pencairan dana ini dapat dilakukan melalui transfer bank dan juga langsung secara tunai. Setelah pencairan, AO akan melakukan monitoring terhadap pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

4.2.5 Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit

Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan kredit nasabah. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip 5C di BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit.

a) Character (Karakter)

Analisis karakter calon nasabah merupakan komponen penting dalam menilai keandalan dan tanggung jawab nasabah. Saat ini proses dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung. Selain itu juga dilakukan dengan cara melihat dari SLIK masing-masing nasabah

b) Capacity (Kemampuan)

Kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dinilai berdasarkan pendapatan dan potensi penghasilan. Saat ini, BPR DP Taspen menganalisis gaji ASN pegawai aktif dan mensyaratkan sisa 70% dari gaji setelah potongan serta dengan BI checking calon nasabah yang bagus.

c) Capital (Modal)

Modal yang dimiliki oleh calon nasabah dievaluasi untuk menilai efektivitas penggunaannya. Jika terjadi risiko kredit, usaha yang dijalankan oleh debitur akan berfungsi sebagai jaminan dan menjadi tanggung jawab debitur untuk membuktikan kepada pihak bank bahwa usahanya tetap berkembang.

d) Collateral (Agunan)

Agunan yang diminta oleh PT. BPR DP Taspen hanya berupa SK (Surat Keputusan). SK yang dijadikan jaminan juga dapat digunakan pada bank lain seperti BJB, sehingga ini mungkin kurang kuat untuk dijadikan jaminan.

e) Condition (Kondisi)

Kondisi ekonomi, termasuk faktor politik, sosial dan budaya, sangat mempengaruhi keputusan pemberian kredit. BPR DP Taspen perlu lebih responsif terhadap perubahan kondisi makroekonomi dan mengintegrasikan analisis ekonomi makro dalam proses evaluasi kredit.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit berfungsi untuk meminimalkan risiko kredit bagi bank dan memastikan bahwa pinjaman diberikan kepada calon debitur yang memiliki kemungkinan tinggi untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Prinsip ini membantu bank dalam mengambil keputusan kredit yang lebih terinformasi dan mengurangi kemungkinan kredit bermasalah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit pegawai aktif pada PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang, dengan fokus pada dua rumusan masalah utama. Berdasarkan hasil analisis data dan temuan yang diperoleh, berikut kesimpulan dari penelitian ini:

1) **Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Aktif:**

Prosedur pemberian kredit pegawai aktif pada BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Proses ini dimulai dengan pengumpulan berkas kredit, verifikasi dokumen, analisis kelayakan nasabah, persetujuan oleh komite kredit, penandatanganan perjanjian kredit, hingga realisasi dana pinjaman. Setiap tahap dalam proses ini dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa nasabah yang diberikan kredit memenuhi persyaratan dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

2) **Evaluasi Prinsip 5C:**

Dalam penerapan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition), ditemukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki atau disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit.

- a) **Character (Karakter):** Evaluasi karakter nasabah harus lebih teliti dan mendalam untuk memastikan bahwa nasabah memiliki integritas dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya. Penggunaan alat bantu seperti BI Checking sangat membantu dalam menilai karakter nasabah berdasarkan riwayat kredit sebelumnya.
- b) **Capacity (Kemampuan):** Penilaian kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman harus lebih komprehensif, termasuk analisis lebih mendetail tentang sumber pendapatan dan stabilitas

keuangan nasabah. Ini penting untuk mengurangi risiko kredit macet.

Dengan melihat juga dari SLIK masing-masing calon nasabah

- c) Capital (Modal): Analisis modal atau aset yang dimiliki nasabah perlu diperkuat untuk memastikan bahwa memiliki cadangan yang cukup dalam menghadapi risiko keuangan.
- d) Collateral (Agunan): Pengikatan agunan harus dilakukan dengan lebih hati-hati, memastikan bahwa nilai agunan cukup untuk menutupi jumlah pinjaman jika terjadi default. Penggunaan jaminan SK (Surat Keputusan) saja perlu dipertimbangkan dengan seksama.
- e) Condition (Kondisi): Penilaian kondisi ekonomi makro dan mikro yang mempengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman harus lebih diperhatikan. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintahan atau kondisi ekonomi regional dapat mempengaruhi kelayakan nasabah.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis yang signifikan dalam bidang manajemen keuangan dan perbankan, khususnya terkait penerapan prinsip 5C dalam pemberian kredit. Implikasi teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Teori Evaluasi Kredit: Penelitian ini menambah wawasan tentang bagaimana prinsip 5C dapat diterapkan secara efektif dalam konteks kredit pegawai aktif. Temuan ini memperkaya literatur tentang evaluasi kredit dengan memberikan bukti empiris dari praktik di lapangan.
2. Pemahaman tentang Risiko Kredit: Penelitian ini membantu memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor risiko yang dapat mempengaruhi kualitas kredit pegawai aktif. Dengan mengidentifikasi aspek-aspek prinsip 5C yang perlu diperbaiki, penelitian ini berkontribusi pada teori manajemen risiko kredit.

5.2.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini juga memiliki implikasi praktis yang dapat digunakan oleh PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang dan lembaga perbankan lainnya untuk meningkatkan kualitas pemberian kredit dan mengelola risiko kredit dengan lebih efektif. Implikasi praktis yang dihasilkan dari penelitian ini meliputi:

1. Peningkatan Prosedur Kredit: Bank perlu meningkatkan prosedur pemberian kredit dengan memperketat verifikasi dokumen dan penilaian risiko. Implementasi langkah-langkah yang lebih teliti dalam analisis karakter dan kemampuan nasabah dapat membantu mengurangi risiko kredit macet.
2. Penguatan Kebijakan Kredit: Penelitian ini menunjukkan kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan kredit agar lebih responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial. Bank harus mengembangkan kebijakan yang adaptif dan fleksibel, termasuk dalam penetapan suku bunga dan pengelolaan agunan.
3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan: Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengevaluasi kinerja kredit dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Hal ini termasuk memantau penggunaan dana pinjaman dan kinerja angsuran nasabah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menilai hasil dan kesimpulan yang dihasilkan. Keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Responden Terbatas: Penelitian ini hanya melibatkan empat orang pegawai di BPR DP Taspen Cabang Karawang sebagai responden. Jumlah responden yang terbatas ini dapat mempengaruhi representativitas temuan, sehingga hasil penelitian mungkin tidak mencerminkan pandangan keseluruhan pegawai di cabang tersebut.

2. Ketergantungan pada Wawancara: Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data yang diperoleh dari wawancara dengan responden. Ketergantungan pada wawancara juga membawa risiko bias subjektif dari responden, yang dapat mempengaruhi validitas temuan.
3. Akses Terbatas ke Data Sensitif: Keterbatasan dalam mengakses data sensitif atau rahasia perusahaan juga menjadi hambatan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh hanya berasal dari wawancara, sehingga informasi yang bersifat internal dan rahasia perusahaan tidak dapat diakses dan dianalisis secara mendalam.

5.4 Rekomendasi Untuk Peneliti Berikutnya

Berdasarkan keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini, ada beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam:

1. Menggunakan Metode Campuran: Disarankan untuk menggunakan metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data kuantitatif seperti laporan keuangan, statistik kredit macet, dan data operasional bank dapat memberikan dukungan yang lebih objektif terhadap analisis yang dilakukan.
2. Memperluas Cakupan Penelitian: Selain fokus satu cabang, pertimbangkan untuk memperluas penelitian ke beberapa cabang BPR DP Taspen. Hal ini akan membantu dalam memahami variasi dalam penerapan prinsip 5C di berbagai lokasi dan kondisi operasional yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyola, Y. (2023). Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Pada Prosedur Pemberian Kredit Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Laweyan Solo Slamet Riyadi.
- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. 1(1).
- Alamri, N. F., Amaliah, T., & Husain, S. P. (2023). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Ritel Untuk Menghindari Kredit Macet pada Bank BRI Cabang Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 4(2), 321–332.
- Aprita, R. A. (2023). Implementasi Analisis Prinsip 5C (Studi Pada KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Kediri) Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan.
- Baiya, J. F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Pada Bank Nagari Cabang Siteba.
- Bali, I. N. A. P., & Darma, G. S. (2019). Menguji Kesiapan Pengelolaan Desa Berbasis Manajemen Modern Guna Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 16(2), 1–13.
- Basori, O. R., & Wahyuningsih, S. D. (2018). Analisis penilaian prinsip 5C dalam pemberian kredit terhadap non performing loan guna menilai tingkat kesehatan Bank pada PT BPR Harta Swadiri Pandaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 3(1), 54–63.
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5c Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99–113.

- Fadlan, A. F. (2022). Bank dan lembaga keuangan lainnya. Publica Indonesia Utama.
- Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(8), 1–15.
- Kosasih, J. I., & SH, M. (2021). Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit Bank. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Masrohatin, S., Mutmainah, S., Dewi, Y. F., & Mukaromah, L. T. (2023). Peran Sosialisasi Ketaspenan Untuk Mengetahui Program Layanan dan Produk Pada PT. Bank Mandiri Taspen Kantor Cabang Jember. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan, 3(4).
- Mosey, A. C., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Pengaruh Risiko Pasar Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bumh Yang Terdaftar Di Bei Periode 2012-2016. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 6(3).
- Mutiarawati, I. (2018). IMPLEMENTASI PRINSIP 5C (The Five C's Of Credit) DALAM RANGKA PEMBERIAN PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (Studi di PD. BPR Bank Jombang).
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Putra, A. Y. R. (2017). Pelaksanaan Pengambilan Jaminan Kredit Oleh Pihak Ketiga Karena Debitur Tidak Diketahui Keberadaannya Di Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta. ., 1–13.

- Rahmayeli, D. S., & Marlius, D. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batang Kapas Pesisir Selatan.
- Rahmi, C. L. (2014). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas Dan Risiko Tingkat Bunga Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Akuntansi*, 2(3).
- Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan. *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 69–75.
- Suardewi, N. K. A. (2022). Analisis Penerapan Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah di PT BPD Bali Cabang Klungkung.
- Sukma, D. A., Soleh, O., & Yusrina, Y. (2017). Analisis Kelayakan Penilaian Kredit Menggunakan Metode Analisa 5c Sebagai Penunjang Keputusan Kredit Pada Pt. Bpr Hariarta Sedana. 1(1), 395–401.
- Sumual, J. (2016). Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Tugas dan Fungsi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Administratum*, 4(3).
- Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan prinsip 5c dalam pemberian kredit sebagai perlindungan bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 1(1).

INSTRUMEN PENELITIAN

Transkrip Wawancara I

Hari/Tanggal : 31 Januari 2024
Durasi : 120 menit
Narasumber : Staff Account Officer I

1. Jenis kredit apa saja yang ada di BPR DP Taspen?

Pada PT BPR DP Taspen, terdapat beberapa jenis kredit yang ditawarkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Pertama, Kredit Pegawai Aktif yang ditujukan bagi pegawai ASN dan karyawan PT Taspen dengan suku bunga kompetitif serta jumlah pinjaman dan jangka waktu yang fleksibel. Kedua, Kredit Pensiun Regular yang dirancang khusus untuk para pensiunan dengan syarat yang ketentuan yang disesuaikan dengan pendapatan pensiun mereka. Ketiga, Kredit Pensiun Platinum, yang menawarkan fasilitas kredit dengan limit yang lebih tinggi dan suku bunga yang bersaing bagi para pensiunan dengan riwayat kredit yang baik. Selanjutnya, Kredit Pensiun Platinum Plus memberikan layanan kredit dengan keuntungan tambahan dan lebih fleksibel dibandingkan produk kredit pensiun lainnya. Selain itu, ada juga Kredit Wiraswasta, yang diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah untuk membantu perkembangan bisnis mereka. Terakhir, Kredit Jande yang ditujukan pada jaminan deposito, memberikan dukungan finansial dengan ketentuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan beragam jenis kredit ini, PT. BPR DP Taspen berupaya untuk memenuhi kebutuhan finansial berbagai segmen nasabah secara komprehensif.

2. Apa yang dimaksud dengan Kredit Pegawai Aktif?

Kredit Pegawai Aktif adalah fasilitas pinjaman yang diberikan khusus kepada pegawai aktif, seperti Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan karyawan di instansi PT TASPEN (Persero). Fasilitas ini biasanya menawarkan suku bunga yang kompetitif dan memberikan fleksibilitas dalam jumlah pinjaman serta jangka waktu pembayaran, yang disesuaikan dengan kemampuan finansial atau gaji masing-masing karyawan. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi

kebutuhan finansial pegawai aktif dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan.

3. *Persyaratan apa saja yang diperlukan pada pengajuan Kredit Pegawai Aktif? Untuk mengajukan Kredit Pegawai Aktif di PT BPR DP Taspen, terdapat beberapa persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Pertama, diperlukan fotokopi KTP suami istri sebagai identifikasi diri dan pasangan. Kedua, fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi anggota keluarga. Ketiga, fotokopi NPWP sebagai bukti kepemilikan nomor wajib pajak. Keempat, fotokopi buku nikah untuk membuktikan status pernikahan. Selain itu, calon peminjam harus menyediakan pas foto berukuran 3x4 sebanyak dua lembar. Selanjutnya, bagi pegawai ASN yang mengajukan kredit, diperlukan juga beberapa dokumen terkait kepegawaian, seperti fotokopi SK CPNS sebagai bukti pengangkatan pertama kali sebagai calon pegawai negeri. Selain itu, fotokopi SK PNS yang menunjukkan status kepegawaian tetap juga diperlukan. Dokumen lain yang perlu disertakan adalah fotokopi SK pengangkatan terakhir yang menampilkan posisi atau jabatan terkini serta fotokopi kenaikan gaji berkala sebagai bukti peningkatan pendapatan. Semua dokumen ini harus dilengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi dan memperlancar proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif di BPR DP Taspen.*
4. *Bagaimana alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN? Alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN dimulai dengan nasabah mengisi formulir pengajuan kredit yang telah disediakan oleh BPR DP Taspen. Setelah formulir diisi lengkap, petugas Account Officer (AO) akan melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen yang diserahkan oleh nasabah. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen serta kelayakan nasabah untuk menerima kredit. Setelah proses verifikasi selesai, AO akan mengajukan permohonan kredit tersebut ke komite kredit. Komite kredit kemudian melakukan evaluasi mendalam berdasarkan berbagai kriteria dan analisis risiko. Setelah melalui tahap evaluasi, komite kredit akan membuat keputusan apakah kredit disetujui atau ditolak. Keputusan ini kemudian disampaikan kepada nasabah, dan jika disetujui,*

proses pencairan dana kredit akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Bagaimana penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN?

Penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keterjangkauan bagi para debitur. Suku bunga yang ditetapkan oleh BPR DP Taspen dirancang agar tetap kompetitif dan sesuai dengan kemampuan finansial pegawai ASN, sehingga kredit yang ditawarkan menjadi lebih menarik dan terjangkau. Dengan menetapkan suku bunga yang terjangkau, BPR DP Taspen berupaya untuk mendukung kesejahteraan pegawai ASN dengan memberikan akses kepada fasilitas kredit yang memadai dan berkelanjutan.

6. Faktor apa yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami kemacetan atau bermasalah?

Penyebab Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami kemacetan atau bermasalah pada BPR DP Taspen dalam beberapa tahun terakhir ini berhubungan dengan beberapa faktor signifikan yang telah memaksa produk tersebut untuk dinonaktifkan sementara waktu. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah tingginya jumlah nasabah yang menunggak pembayaran angsuran, yang dikenal sebagai kredit macet. Kondisi ini dipicu oleh penghapusan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sebelumnya, BPR menawarkan kredit pegawai aktif melalui bendahara UPTD, di mana gaji ASN disalurkan melalui bendahara ini dan potongan untuk angsuran kredit dilakukan langsung dari gaji mereka sebelum disalurkan kepada BPR. Namun, dengan penghapusan UPTD, gaji para ASN sekarang disalurkan langsung ke rekening masing-masing ASN tanpa melalui bendahar UPTD. Perubahan ini mengakibatkan BPR kehilangan kendali langsung atas pemotongan angsuran dari gaji ASN, sehingga banyak ASN yang gagal membayar angsuran tepat waktu. Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab kredit bermasalah adalah karakter masing-masing individu. Karakter peminjam memainkan peran penting dalam menentukan apakah mereka akan memenuhi kewajiban pembayaran kredit tepat waktu. Beberapa nasabah mungkin kurang disiplin dalam mengelola

keuangan mereka serta tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membayar angsuran kredit.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN yang bermasalah?

Untuk menangani kredit bermasalah, bank atau lembaga keuangan biasanya mengambil berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk meminimalkan kerugian dan memulihkan pembayaran kredit. Salah satu upaya pertama adalah melakukan identifikasi dini terhadap kredit yang berpotensi bermasalah melalui monitoring rutin dan analisis risiko yang ketat. Selain itu, kami juga dapat menawarkan program penjadwalan ulang pembayaran atau memberikan kelonggaran sementara bagi peminjam yang mengalami kesulitan finansial sementara. BPR DP Taspen juga melakukan pendekatan dengan bank lain untuk mencari solusi yang efektif. Dengan pendekatan yang proaktif dan kolaboratif, BPR DP Taspen berupaya menjaga kesehatan portofolio kreditnya dan membantu nasabah memenuhi kewajiban mereka.

8. Apakah keputusan pemberian kredit merupakan wewenang dari Account Officer?

Keputusan pemberian kredit bukan merupakan wewenang dari Account Officer (AO) melainkan wewenang komite kredit yang terdiri dari Branch Manager dan Assistant Branch Manager (ABM). Setelah AO melakukan verifikasi dan analisis awal terhadap pengajuan kredit, hasilnya akan diajukan kepada komite kredit. Komite kredit bertanggung jawab untuk mengevaluasi semua aspek permohonan kredit, termasuk risiko dan kelayakan nasabah. Berdasarkan evaluasi menyeluruh, BM dan ABM akan membuat keputusan akhir apakah kredit akan disetujui atau ditolak. Dengan adanya struktur wewenang ini, BPR DP Taspen memastikan bahwa setiap keputusan pemberian kredit didasarkan pada pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebijakan serta prosedur yang berlaku.

9. Bagaimana pelaporan kredit bermasalah dilakukan dan kepada siapa ?

Pelaporan kredit bermasalah di PT. BPR DP Taspen Cabang Karawang dilakukan dengan prosedur yang distematis dan terstruktur. Setiap kredit yang

mengalami masalah, seperti keterlambatan pembayaran atau potensi gagal bayar, akan dilaporkan oleh petugas penagihan atau analis kredit kepada Branch Manager. Laporan ini mencakup detail tentang nasabah, jumlah tunggakan, riwayat pembayaran dan langkah-langkah yang telah diambil untuk menangani masalah tersebut. Selain itu, laporan ini juga dilengkapi dengan rekomendasi dari petugas kredit mengenai tindakan yang perlu diambil selanjutnya, seperti restrukturisasi kredit atau upaya penagihan intensif. Branch manager kemudian akan meninjau laporan tersebut dan memberikan arahan atau persetujuan terhadap tindakan lanjutan yang perlu dilakukan untuk menangani kredit masalah tersebut. Proses pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kredit bermasalah teridentifikasi dengan cepat dan ditangani secara efektif untuk meminimalkan risiko bagi bank.

10. Apa saja yang menjadi tanggung jawab Staff Account Officer dalam proses pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit ?

Staff Account Officer (AO) memiliki berbagai tanggung jawab dalam proses pemberian kredit hingga pelunasan kredit. AO bertugas mengumpulkan semua data dan dokumen yang diperlukan dari calon nasabah, memastikan bahwa semua informasi yang diberikan lengkap dan akurat. AO juga melakukan analisis awal terhadap kelayakan calon nasabah berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) untuk menilai risiko dan kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Setelah verifikasi dan analisis dilakukan, AO menyusun laporan kredit yang mencakup semua temuan dan rekomendasi terkait pengajuan kredit. Laporan ini kemudian diserahkan kepada komite kredit untuk evaluasi lebih lanjut. Selain itu, AO berkomunikasi dengan komite kredit (BM dan ABM) untuk memberikan klarifikasi tambahan atau informasi yang mungkin diperlukan dalam pengambilan keputusan.

AO memastikan bahwa proses pelunasan kredit berjalan lancar, menghitung sisa kewajiban nasabah, mengatur pembayaran terakhir, dan memastikan semua jaminan dikembalikan kepada nasabah setelah kredit dilunasi. Terakhir, AO memastikan bahwa semua proses kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan peraturan yang berlaku untuk meminimalkan risiko serta memastikan

kepatuhan terhadap standar industri. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, Staff Account Officer berperan penting dalam memastikan bahwa proses pemberian kredit berjalan lancar dan kredit dapat dilunasi tepat waktu.

Transkrip Wawancara II

Hari/Tanggal : Senin, 20 Februari 2024

Durasi : 120 menit

Narasumber : Staff Account Officer II

1. Bagaimana penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN di BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku saat ini. Suku bunga ini mengacu pada base landing rate, yaitu suku bunga dasar kredit yang menjadi acuan bagi bank dalam menentukan suku bunga pinjaman untuk berbagai jenis kredit. Base landing rate ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat inflasi, kebijakan moneter, dan kondisi pasar keuangan. Dalam menetapkan suku bunga kredit pegawai aktif ASN, BPR DP Taspen mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memastikan bahwa suku bunga yang diberikan kompetitif, namun tetap menguntungkan bagi bank. Penetapan suku bunga yang sesuai juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hubungan baik dengan nasabah dan memastikan bahwa kredit yang disalurkan dapat terbayar dengan lancar.

2. Apakah terdapat masalah dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Ya, terdapat beberapa masalah dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN di BPR DP Taspen Kantor Cabang Kawang. Salah satu masalah utama adalah perubahan struktur pembayaran gaji ASN yang berpengaruh pada mekanisme pemotongan angsuran kredit. Sebelumnya, pemotongan angsuran kredit dilakukan melalui bendahara instansi (UPTD), di mana gaji ASN disalurkan melalui bendahara tersebut dan pemotongan angsuran dilakukan langsung sebelum gaji diterima oleh pegawai. Namun, setelah penghapusan UPTD, gaji ASN kini disalurkan langsung ke rekening masing-masing pegawai tanpa melalui bendahara. Perubahan ini mengakibatkan bank kehilangan kendali langsung atas pemotongan angsuran, sehingga banyak ASN yang gagal membayar angsuran tepat waktu ?

Selain itu, masalah administrasi juga sering terjadi, seperti ketidaksesuaian data antara bank dan instansi terkait, yang menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan pembayaran angsuran. Komunikasi yang kurang efektif antara pihak bank dan instansi tempat pegawai bekerja juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran penyaluran kredit. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan Memorandum of Understanding (MOU) terkait pemotongan angsuran juga dapat mengganggu aliran pembayaran angsuran tepat waktu.

Masalah lainnya adalah itikad tidak baik dari sebagian debitur yang tidak disiplin dalam membayar angsuran kredit. Meskipun bank telah melakukan verifikasi ketat saat proses pengajuan kredit, faktor karakter dan komitmen nasabah tetap berperan penting dalam menentukan kelancaran pembayaran angsuran. Beberapa nasabah mungkin kurang disiplin dalam mengelola keuangan mereka dan tidak memiliki komitmen yang kuat membayar angsuran tepat waktu.

Untuk mengatasi masalah ini, BPR DP Taspen perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran kredit dan pemotongan angsuran, meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan instansi terkait, serta mengedukasi nasabah tentang pentingnya disiplin dalam pembayaran angsuran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN dapat berjalan lebih lancar dan risiko kredit macet dapat diminimalkan.

3. Berapakah jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah pada Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah pada program Kredit Pegawai Aktif ASN di BPR DP Taspen Cabang Karawang mencapai 104 orang. Jumlah ini mencerminkan nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kredit bermasalah ini termasuk perubahan kebijakan terkait pemotongan angsuran, ketidaksesuaian dalam implementasi perjanjian

Memorandum of Understanding (MOU) anatara bank dan instansi terkait, serta karakter masing-masing nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, bank telah mengambil berbagai langkah, termasuk penagihan intensif dan restrukturisasi kredit, namun tetap diperlukan upaya yang lebih konsisten dan terkoordinasi untuk mengurangi jumlah kredit bermasalah di masa mendatang.

4. Bagaimana cara BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang dalam monitoring debitur Kredit Pegawai Aktif ASN ?

BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang melakukan monitoring terhadap debitur Kredit Pegawai Aktif ASN melalui sistem core banking. Sistem ini memungkinkan bank untuk secara otomatis dan real-time memantau status pembayaran angsuran kredit, memeriksa riwayat transaksi, dan mengidentifikasi potensi masalah pembayaran. Melalui core banking, bank dapat melihat apakah angsuran dilakukan tepat waktu atau ada keterlambatan, serta melacak pembayaran yang masuk. Selain itu, sistem ini juga membantu dalam mengelola data debitur secara lebih efisien dan akurat, sehingga memudahkan bank untuk mengambil tindakan proaktif jika terdapat indikasi kredit bermasalah. Dengan demikian, core banking menjadi alat yang vital dalam memastikan kelancaran pembayaran kredit dan meminimalkan risiko kredit macet.

5. Bagaimana kriteria kredit bermasalah menurut BPR DP Taspen ?

Kredit dikategorikan sebagai bermasalah jika debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama tiga bulan berturut-turut. Keterlambatan pembayaran ini menunjukkan adanya masalah serius dalam kemampuan atau komitmen debitur untuk memenuhi kewajibannya. Kriteria ini digunakan oleh bank untuk mengidentifikasi pinjaman yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan lanjutan. Ketika debitur gagal membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut, bank akan mengklasifikasikan pinjaman tersebut sebagai non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah. Hal ini memicu langkah-langkah pengangan lebih lanjut, seperti upaya penagihan intensif, restrukturisasi pinjaman, atau bahkan proses hukum jika diperlukan. Dengan

menetapkan kriteria ini, BPR DP Taspen berusaha menjaga kualitas portofolio kreditnya dan mengurangi risiko kerugian finansial.

6. Kendala apa yang dihadapi ketika melakukan penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN, BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang menghadapi beberapa kendala signifikan. Salah satu kendala utama adalah pembubaran bendahara instansi yang sebelumnya bertanggung jawab atas pemotongan gaji pegawai untuk pembayaran angsuran kredit. Dengan bubarnya bendahara instansi, proses pemotongan gaji tidak lagi dapat dilakukan secara otomatis dan langsung, sehingga mengurangi kendali bank atas aliran pembayaran angsuran. Hal ini meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal bayar oleh debitur.

Selain itu, kendala lainnya adalah adanya itikad tidak baik dari beberapa debitur. Meskipun sebagian besar debitur memiliki niat baik untuk memenuhi kewajibannya,, ada sebagian yang kurang disiplin atau tidak memiliki komitmen yang kuat untuk membayar angsuran tepat waktu. Sikap ini menyulitkan bank dalam memastikan pembayaran angsuran sesuai jadwal dan dapat berdampak negatif pada kualitas portofolio kredit.

Kedua kendala ini, baik dari sisi operasional akibat perubahan mekanisme pemotongan gaji maupun dari sisi perilaku debitur, menambah tantangan yang harus dihadapi oleh BPR DP Taspen dalam menyalurkan dan mengelola Kredit Pegawai Aktif ASN dengan efektif.

7. Apakah ada cara untuk mengurangi risiko kredit bermasalah ?

Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang menerapkan beberapa strategi efektif. Salah satu cara adalah dengan mengajukan kredit yang bermasalah ke bank lain yang lebih mampu menangani atau memiliki program restrukturisasi kredit yang lebih baik. Dengan mengalihkan kredit bermasalah ini, BPR DP Taspen dapat mengurangi beban risiko dan fokus pada penanganan kredit yang masih berpotensi baik.

Selain itu, BPR DP Taspen juga dapat melunasi kredit bermasalah dengan melakukan penagihan lebih intensif dan negosiasi ulang dengan debitur untuk mencari solusi pembayaran yang lebih sesuai dengan kondisi finansial debitur. Langkah ini bisa melibatkan restrukturisasi kredit, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, penurunan suku bunga, atau pengurangan pokok pinjaman untuk meringankan beban debitur.

Pendekatan lain yang bisa diambil adalah dengan meningkatkan selektivitas dalam proses pemberian kredit sejak awal, memastikan bahwa hanya calon debitur dengan risiko rendah yang diberikan kredit. Hal ini bisa dilakukan dengan memperketat analisis kredit, memperhatikan dengan seksama riwayat kredit calon debitur, dan memastikan adanya jaminan yang memadai.

Dengan mengimplentasikan strategi-startegi ini, BPR DP Taspen dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko kredit bermasalah dan menjaga kualitas portofolio kreditnya tetap baik.

8. Apakah keputusan pemberian kredit merupakan wewenang dari Account Officer ?

Tidak, keputusan pemberian kredit bukan merupakan wewenang dari Account Officer (AO) saja. Meskipun Account Officer memiliki peran penting dalam proses pengajuan kredit, mulai dari mengumpulkan berkas permohonan, melakukan analisis awal, hingga melakukan verifikasi lapangan, keputusan akhir mengenai pemberian kredit berada di tangan komite kredit atau manajemen bank.

Proses pengajuan kredit biasanya diawali dengan pengumpulan berkas dan dokumen persyaratan oleh AO. AO kemudian melakukan analisis awal terhadap kelayakan nasabah berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition).AO juga bertanggung jawab untuk melakukan wawancara dengan nasabah dan melakukan survei lapangan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai kondisi keuangan dan usaha nasabah.

Setelah AO menyelesaikan tugasnya, berkas pengajuan kredit beserta hasil analisis diserahkan kepada komite kredit. Komite kredit terdiri dari beberapa

anggota manajemen bank yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah pengajuan kredit disetujui atau ditolak. Komite kredit akan mengevaluasi kembali semua informasi yang telah dikumpulkan oleh AO, termasuk hasil verifikasi dan survei lapangan, serta mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan dari pemberian kredit tersebut.

Keputusan komite didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kebijakan internal bank, regulasi yang berlaku, serta kondisi ekonomi dan pasar. Jika komite kredit memutuskan untuk menyetujui pengajuan kredit, maka proses administrasi selanjutnya akan dilakukan untuk mempersiapkan perjanjian kredit dan pencairan dana. Namun, jika pengajuan kredit ditolak, AO akan memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai alasan penolakan dan, jika memungkinkan, memberikan saran mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh nasabah untuk meningkatkan kelayakan kredit di masa depan.

Dengan demikian, meskipun AO memiliki peran penting dalam proses pengajuan kredit, keputusan akhir tetap berada di tangan komite kredit atau manajemen bank, yang memiliki wewenang untuk mempertimbangkan semua aspek dan risiko sebelum memberikan persetujuan kredit.

9. Apakah jika nasabah masuk dalam kategori macet akan berdampak kepada Account Officer yang menerima proses pengajuannya ?

Betul, jika nasabah masuk dalam kategori kredit macet, hal ini akan berdampak pada Account Officer (AO) yang menerima dan mengelola proses pengajuannya. AO bertanggung jawab untuk melakukan analisis kelayakan kredit berdasarkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition), serta melakukan survei dan verifikasi lapangan. Ketika kredit yang diajukan oleh AO menjadi macet, hal ini dapat mencerminkan keruangannya ketelitian atau ketepatan dalam analisis risiko yang dilakukan oleh AO.

Dampak pada AO bisa berupa penilaian kinerja yang lebih rendah karena kredit macet dianggap sebagai salah satu indikator kinerja yang buruk. Bank biasanya memiliki mekanisme penilaian kinerja yang mempertimbangkan tingkat keberhasilan dalam pengelolaan portofolio kredit, termasuk rasio kredit bermasalah (Non-Performing-Loan). AO yang memiliki portofolio

dengan NPL tinggi mungkin akan mendapatkan evaluasi kinerja yang negatif, yang bisa berpengaruh pada bonus, kenaikan gaji, atau peluang promosi.

Selain itu, AO juga mungkin diminta untuk menjelaskan alasan di balik terjadinya kredit macet dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Bank mungkin akan melakukan audit internal untuk mengevaluasi proses analisis kredit yang dilakukan oleh AO dan memastikan bahwa semua prosedur dan kebijakan telah diikuti dengan benar. Namun, penting untuk dicatat bahwa kredit macet tidak selalu disebabkan oleh kesalahan AO. Faktor eksternal seperti perubahan kondisi ekonomi, bencana alam, atau permasalahan pada nasabah yang tidak dapat diprediksi juga bisa menyebabkan kredit menjadi macet. Oleh karena itu, evaluasi kinerja AO biasanya dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kredit macet.

Dalam upaya untuk mengurangi dampak negatif dari kredit macet, AO perlu bekerja sama dengan tim manajemen risiko dan penagihan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi, seperti restrukturisasi kredit atau penagihan aktif. AO juga perlu meningkatkan kompetensi dalam analisis kredit dan manajemen risiko untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit macet di masa mendatang.

10. Apa saja yang menjadi tanggung jawab Staff Account Officer dalam proses pemberian kredit sampai dengan pelunasan kredit ?

Staff Account Officer (AO) memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam proses pemberian kredit. Pertama, AO bertanggung jawab untuk melakukan analisis awal terhadap calon nasabah, termasuk mengevaluasi kelayakan kredit berdasarkan dokumen yang diserahkan. AO juga harus melakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memahami tujuan pinjaman dan kemampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Selanjutnya, AO melakukan verifikasi data dan informasi yang diberikan oleh calon nasabah, termasuk memeriksa riwayat kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memastikan tidak ada catatan buruk atau kredit macet sebelumnya,

AO juga berperan dalam mengurus dokumen perjanjian kredit, memastikan bahwa semua ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Setelah kredit disetujui dan dicairkan, AO terus memantau kinerja kredit nasabah, memastikan bahwa pembayaran angsuran dilakukan tepat waktu dan mengatasi masalah jika terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar.

Tanggungjawab AO mencakup pelaporan secara berkala kepada manajemen mengenai status kredit nasabah dan menyusun strategi untuk meminimalkan risiko kredit macet. Dengan demikian, peran AO sangat krusial dalam memastikan proses pemberian kredit berjalan lancar dan mengurangi risiko bagi bank.

Transkrip Wawancara III

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2024
 Durasi : 120 menit
 Narasumber : Assisten Manajer Operasional

1. Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Pada saat pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN di PT. BPR DP Taspen, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Pertama, calon debitur perlu menyediakan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari suami istri, sebagai bukti identitas yang sah. Kedua, fotokopi KK (Kartu Keluarga) juga diperlukan untuk memverifikasi informasi keluarga calon debitur. Selain itu, fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) diperlukan untuk memastikan bahwa calon debitur telah memenuhi kewajiban pajak. Kemudian, calon debitur harus menyertakan SK (Surat Keputusan) pangkat terakhir dalam bentuk asli, sebagai bukti resmi mengenai pangkat atau jabatan yang dipegang saat ini. Juga, SK 80% dan SK100% dalam bentuk asli diperlukan sebagai bukti status kepegawaian yang menunjukkan bahwa calon debitur telah memenuhi persyaratan tertentu dalam masa percobaan dan telah diangkat sebagai pegawai tetap. Selanjutnya, slip gaji juga harus disertakan untuk menunjukkan pendapatan bulanan calon debitur, yang penting untuk menilai kemampuan finansialnya dalam membayar angsuran kredit. Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg) dan Kartu Taspen diperlukan sebagai bukti kepegawaian dan partisipasi dalam program jaminan sosial bagi pegawai negeri. Semua dokumen ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai identitas, status kepegawaian kemampuan finansial, dan komitmen calon debitur dalam memenuhi kewajiban kredit. Proses verifikasi yang teliti terhadap dokumen-dokumen ini membantu BPR DP Taspen dalam memastikan bahwa kredit yang diberikan memiliki risiko minimal dan dapat dikelola dengan baik.

2. Bagaimana alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN di PT. BPR DP Taspen melibatkan beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon debitur. Pertama, calon debitur harus mengumpulkan semua berkas yang diperlukan untuk pengajuan kredit, seperti fotokopi KTP suami dan istri, fotokopi KK, fotokopi NPWP, asli SK pangkat terakhir, asli SK 80%, asli SK 100%, slip gaji, fotokopi Kartu Pegawai, dan fotokopi Kartu Taspen. Setelah semua berkas terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan status flaging untuk menentukan apakah pengajuan kredit dapat dilanjutkan atau tidak. Jika status flaging menunjukkan hasil yang baik, proses berlanjut ke tahap berikutnya.

Tahap selanjutnya adalah pengecekan BI Checking untuk memastikan bahwa calon debitur tidak memiliki catatan buruk atau hutang yang belum dilunasi di bank lain. Jika terdapat hutang di bank lain, calon debitur harus melunasinya setelah kredit cair. Setelah itu, calon debitur harus menjalani pemeriksaan kesehatan, yang meliputi pengukuran tinggi badan dan berat badan, untuk memastikan bahwa calon debitur dalam kondisi fisik yang baik. Selain itu, calon debitur juga harus membuat video asuransi sebagai bagian dari proses pengajuan kredit.

Setelah semua pemeriksaan dan verifikasi selesai, langkah berikutnya adalah penginputan data kredit ke dalam sistem. Petugas BPR DP Taspen akan memasukkan semua informasi yang telah dikumpulkan dan diverifikasi ke dalam sistem untuk pemrosesan lebih lanjut. Proses ini memastikan bahwa semua data telah sesuai dan lengkap sebelum kredit disetujui dan dicairkan. Dengan mengikuti alur proses yang terstruktur dan teliti ini, BPR DP Taspen dapat memastikan bahwa kredit yang diberikan kepada pegawai aktif Asn dilakukan dengan risiko yang minimal dan dalam kondisi yang terkontrol.

3. Bagaimana penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Penetapan suku bunga pada Kredit Pegawai Aktif ASN di PT. BPR DP Taspen dilakukan melalui keputusan direksi yang telah ditentukan sebelumnya. Keputusan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk kondisi pasar keuangan, tingkat suku bunga yang berlaku di industri perbankan, serta analisis risiko kredit. Direksi PT. BPR DP Taspen menetapkan suku bunga

dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara daya tarik produk kredit bagi calon debitur dan keberlanjutan bisnis perbankan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, kebijakan moneter, dan persaingan dengan institusi keuangan lainnya, direksi memastikan bahwa suku bunga yang ditetapkan kompetitif namun tetap mampu menutupi risiko dan biaya operasional yang terkait dengan penyaluran kredit. Keputusan ini juga disesuaikan dengan strategi bisnis jangka panjang BPR DP Taspen untuk menjaga kesehatan finansial dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis data, penetapan suku bunga diharapkan mampu menarik minat pegawai aktif ASN untuk mengajukan kredit sekaligus memastikan bahwa kredit yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan menguntungkan bagi bank.

4. Apakah terdapat masalah dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN, pihak bank tidak memberikan informasi detail mengenai adanya masalah atau kendala yang mungkin terjadi. Hal ini dikarenakan informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak dapat diungkapkan kepada publik. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kerahasiaan internal bank serta melindungi privasi nasabah. Meskipun demikian, bank selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan memastikan bahwa proses penyaluran kredit berjalan lancar serta memenuhi kebutuhan dan harapan nasabah.

5. Faktor apa yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami macet atau bermasalah ?

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami macet atau bermasalah adalah kesepakatan Memorandum of Understanding (MOU) terkait pemotongan angsuran. MOU ini mengatur bagaimana angsuran kredit akan dipotong langsung dari gaji pegawai. Jika terjadi ketidaksesuaian atau masalah dalam implementasi MOU tersebut, seperti perubahan kebijakan pemotongan angsuran atau kesalahan administrasi, hal ini dapat mengganggu aliran pembayaran angsuran atau secara tepat waktu. Selain itu, jika MOU tidak dijalankan dengan konsisten

atau terjadi komunikasi yang buruk antara pihak bank dan instansi tempat pegawai bekerja, risiko kredit macet meningkat. Oleh karena itu, penting bagi bank dan instansi terkait untuk memastikan bahwa MOU dijalankan dengan baik dan transparan untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah.

6. Berapakah jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah pada Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Informasi mengenai jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah pada Kredit Pegawai Aktif ASN bersifat rahasia dan pihak bank tidak memberikan jawaban terkait hal ini. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan melindungi informasi sensitif yang dapat mempengaruhi reputasi serta operasional bank. Pihak bank berkomitmen untuk menangani permasalahan kredit secara internal dan memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diambil untuk mengelola risiko kredit dengan baik. Dengan demikian, informasi tersebut tidak dapat diungkapkan kepada publik atau pihak eksternal.

7. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN yang bermasalah?

Dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN yang bermasalah, PT. BPR DP Taspen menerapkan berbagai upaya strategis untuk memastikan pemulihan kredit yang efektif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penagihan langsung di lokasi (on the spot), dimana petugas kredit mendatangi nasabah untuk menagih pembayaran secara langsung. Selain itu, bank juga membuat janji bayar dengan nasabah, yang melibatkan penandatanganan surat pernyataan janji bayar bermaterai. Surat ini berfungsi sebagai komitmen resmi dari nasabah untuk melunasi tunggakan dalam waktu yang telah disepakati.

Petugas bank juga intensif dalam mengejar pembayaran dengan mengunjungi rumah nasabah yang bersangkutan. Jika diperlukan, penagihan juga dilakukan ke instansi tempat nasabah bekerja untuk memastikan bahwa pihak terkait mengetahui kewajiban pembayaran angsuran. Selain itu, dalam kasus tersebut, bank meminta jaminan tambahan dari nasabah untuk memperkuat

posisi kredit dan mengurangi risiko kredit macet. Upaya-upaya ini dirancang untuk meningkatkan disiplin pembayaran dan mengurangi tingkat kredit bermasalah, sekaligus memastikan bahwa bank tetap dapat mengelola portofolio kreditnya secara sehat dan berkelanjutan.

8. Bagaimana cara BPR DP Taspen Cabang Karawang dalam monitoring debitur Kredit Pegawai Aktif ASN ?

BPR DP Taspen Cabang Karawang melakukan monitoring terhadap debitur Kredit Pegawai Aktif ASN dengan memantau kelancaran pemotongan angsuran. Monitoring ini dilakukan dengan mengecek apakah angsuran kredit dipotong secara tepat waktu dan sesuai dengan jumlah yang seharusnya dari gaji debitur. Bank secara rutin meninjau laporan pemotongan angsuran untuk memastikan tidak ada keterlambatan atau kekurangan dalam pembayaran. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian atau masalah dalam pemotongan angsuran, petugas bank akan segera mengambil tindakan untuk menghubungi debitur guna menyelesaikan masalah tersebut. Langkah ini penting untuk menjaga kualitas kredit dan memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya secara konsisten. Monitoring yang cermat dan berkelanjutan membantu BPR DP Taspen Cabang Karawang dalam mengelola risiko dan mempertahankan kesehatan portofolio kredit mereka.

9. Bagaimana pelaporan kredit bermasalah dilakukan dan kepada siapa ?

Pelaporan kredit bermasalah dilakukan dengan menyampaikan informasi terkait kepada pimpinan bidang kredit. Proses ini melibatkan pengumpulan data dan analisis mengenai kredit yang mengalami kendala, seperti keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi angsuran. Setelah data terkumpul, petugas kredit menyusun laporan yang merinci kondisi dan status kredit bermasalah tersebut. Laporan ini kemudian disampaikan secara resmi kepada pimpinan bidang kredit untuk ditinjau. Pimpinan bidang kredit akan mengevaluasi situasi, menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil, dan memberikan arahan kepada tim kredit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan pelaporan yang terstruktur dan komunikasi yang jelas, BPR DP Taspen memastikan bahwa setiap kredit

bermasalah dapat ditangani dengan cepat dan efektif, serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

10. Bagaimana kriteria kredit bermasalah menurut BPR DP Taspen ?

Kriteria kredit bermasalah menurut BPR DP Taspen ditentukan berdasarkan keterlambatan pembayaran angsuran. Kredit dianggap bermasalah jika debitur sudah tidak melakukan pembayaran angsuran selama satu bulan atau lebih. Ketika pembayaran angsuran tidak dilakukan tepat waktu, hal ini menandakan adanya potensi masalah keuangan pada debitur yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak bank. BPR DP Taspen memonitor secara ketat pembayaran angsuran setiap bulannya dan segera mengidentifikasi kredit yang mulai menunjukkan tanda-tanda masalah. Dengan menetapkan kriteria yang jelas, bank dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah kredit, seperti menghubungi debitur untuk mencari solusi atau melakukan penagihan intensif guna mencegah peningkatan risiko kredit macet.

Transkrip Wawancara IV

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juli 2021

Durasi : 120 menit

Narasumber : Branch Manager

1. Persyaratan apa saja yang diperlukan pada saat pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Untuk pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Pertama, calon peminjam harus mengisi formulir permohonan kredit yang disediakan oleh bank. Formulir ini mencakup informasi pribadi dan rincian mengenai jumlah serta tujuan pinjaman. Selanjutnya, calon peminjam harus menyerahkan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai bukti identitas resmi. Selain itu, fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga diperlukan untuk memverifikasi kewajiban perpajakan peminjam. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) harus disertakan sebagai bukti hubungan keluarga dan domisili.

Bagi pegawai yang statusnya masih Calon Pegawai Negeri Sipil (CAPEG), wajib menyerahkan fotokopi SK 80% yang menunjukkan status pengangkatan sementara mereka. Sedangkan, bagi pegawai yang telah diangkat sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) harus menyerahkan fotokopi 100% yang menunjukkan pengangkatan resmi sebagai ASN. Semua dokumen ini diperlukan untuk memastikan identitas, status kepegawaian, dan kelayakan peminjam dalam mengajukan kredit di bank tersebut.

2. Bagaimana alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Alur proses pengajuan Kredit Pegawai Aktif ASN terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon peminjam untuk memastikan bahwa semua persyaratan terpenuhi dan kredit dapat dicairkan dengan lancar. Pertama, calon peminjam mengajukan permohonan kredit dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Setelah permohonan diajukan, tahap selanjutnya adalah verifikasi persyaratan. Pada tahap ini, petugas bank akan memeriksa

keaslian dan kelengkapan dokumen yang telah diserahkan seperti KTP, NPWP, KK, SK 80% atau SK 100%.

Setelah verifikasi persyaratan selesai, bank akan melakukan pemeriksaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mengecek riwayat kredit calon peminjam. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon peminjam tidak memiliki masalah kredit di bank atau lembaga keuangan lainnya. Jika hasil SLIK menunjukkan bahwa calon peminjam layak untuk menerima kredit, bank akan melanjutkan ke tahap survei. Petugas bank akan melakukan survei ke tempat kerja atau kediaman calon peminjam untuk mengecek kondisi dan kebenaran informasi yang diberikan.

Setelah survei selesai dan hasilnya memuaskan, proses pengajuan kredit akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu proses pengolahan data dan penilaian kelayakan kredit oleh bank. Jika permohonan disetujui, calon peminjam akan diundang untuk melakukan akad kredit. Pada tahap akad kredit, calon peminjam dan pihak bank akan menandatangani perjanjian kredit yang berisi syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk jadwal angsuran, suku bunga, dan biaya-biaya lainnya. Setelah akad kredit ditandatangani, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening calon peminjam sesuai dengan kesepakatan.

Terakhir, setelah dana dicairkan, bank akan mulai mendebet angsuran kredit dari rekening peminjam sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pendebetan angsuran ini dilakukan setiap bulan hingga pinjaman lunas. Dengan mengikuti alur proses pengajuan kredit yang rinci ini, bank dapat memastikan bahwa setiap pengajuan kredit diproses secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. Apakah terdapat masalah dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Dalam penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN terdapat beberapa masalah yang kadang-kadang muncul dan mempengaruhi kelancaran proses. Salah satu masalah utama yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam pengumpulan dan verifikasi dokumen dari calon peminjam. Dokumen-dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar dapat memperlambat proses verifikasi dan persetujuan kredit. Selain itu, adanya masalah teknis dalam sistem bank,

seperti gangguan pada sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) atau sistem internal bank, juga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengecekan riwayat kredit dan kelayakan peminjam.

Masalah lain yang mungkin terjadi adalah kendala dalam tahap survei, seperti kesulitan petugas bank untuk mengakses lokasi tempat kerja atau kediaman calon peminjam, atau ketidaksesuaian informasi yang ditemukan selama survei dengan informasi yang diberikan oleh calon peminjam. Selain itu, dalam beberapa kasus, calon peminjam mungkin memiliki riwayat kredit yang buruk atau masalah keuangan lain yang tidak terdeteksi pada awalnya, yang kemudian dapat menjadi kendala dalam persetujuan kredit.

Kendala administrasi dan birokrasi di instansi tempat calon peminjam bekerja juga dapat menjadi masalah, seperti keterlambatan dalam pengeluaran Surat Keputusan (SK) atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk pengajuan kredit. Semua masalah ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat proses penyaluran kredit dan berdampak pada kepuasan nasabah serta efektivitas operasional bank. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memiliki prosedur yang jelas dan efisien serta melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait untuk mengatasi dan meminimalkan masalah-masalah tersebut.

4. Faktor apa yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami macet atau bermasalah ?

Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan Kredit Pegawai Aktif ASN mengalami macet atau bermasalah adalah payroll gaji yang dilakukan melalui bank daerah. Ketika payroll gaji ASN dikelola oleh bank daerah, bukan oleh bank yang memberikan kredit, dapat timbul beberapa isu yang memengaruhi kelancaran pembayaran angsuran kredit. Pertama, keterlambatan atau ketidaktepatan dalam transfer gaji dari bank daerah ke bank pemberi kredit dapat menyebabkan terjadinya tunggakan angsuran. Jika gaji tidak diterima tepat waktu, otomatis pembayaran angsuran kredit yang biasanya dipotong langsung dari gaji juga akan tertunda.

Selain itu, adanya perubahan atau kesalahan dalam data payroll, seperti perbedaan nama, nomor rekening atau jumlah gaji yang diterima, juga bisa menjadi kendala. Kesalahan ini dapat mengakibatkan angsuran kredit tidak terdibet dengan benar, sehingga menimbulkan tunggakan yang tidak disadari oleh peminjam. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi atau komunikasi antara bank daerah dan bank pemberi kredit, yang dapat memperburuk situasi ketika terjadi masalah dengan payroll gaji ASN.

Kondisi ini memerlukan perhatian dan koordinasi yang baik antara bank pemberi kredit, bank daerah dan instansi tempat ASN bekerja. Bank pemberi kredit harus memastikan bahwa sistem pemotongan angsuran dari gaji berjalan dengan lancar dan tepat waktu, serta memiliki mekanisme untuk menangani dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul akibat kesalahan atau keterlambatan dalam payroll gaji. Dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, risiko kredit macet akibat masalah payroll dapat diminimalkan. Sehingga menjaga kesehatan portofolio kredit bank dan kepuasan nasabah.

5. Berapakah jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah pada Kredit Pegawai Aktif ?

Jumlah nasabah yang terlibat dalam kredit macet atau bermasalah pada Kredit Pegawai Aktif ASN di BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang saat ini adalah sebanyak 103 orang. Angka ini menunjukkan jumlah nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kredit mereka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kredit macet atau bermasalah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor; seperti kesalahan dalam sistem payroll gaji, perubahan kondisi ekonomi, atau masalah pribadi yang mengakibatkan ketidakmampuan nasabah untuk membayar tepat waktu. Pihak bank terus memantau dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk menangani kredit macet ini, seperti penagihan langsung, negosiasi ulang syarat kredit, serta memberikan edukasi dan solusi yang dapat membantu nasabah dalam mengelola pembayaran kredit mereka. Dengan demikian, diharapkan masalah kredit macet dapat diminimalkan, dan nasabah dapat

kembali ke jalur pembayaran yang lancar. Upaya ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan portofolio kredit bank, serta mempertahankan hubungan yang baik dengan nasabah.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN yang bermasalah ?

Dalam menangani Kredit Pegawai Aktif ASN yang bermasalah, BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang melakukan beberapa upaya strategis untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh nasabah. Pertama, dilakukan flagging terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Flagging adalah proses menandai akun nasabah yang menunjukkan tanda-tanda masalah dalam pembayaran angsuran. Dengan adanya flagging, bank dapat dengan cepat mengidentifikasi nasabah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan tindakan lebih lanjut.

Selanjutnya, bank juga melakukan upaya penagihan atau collecting secara intensif. Petugas penagihan bank akan menghubungi nasabah yang bermasalah untuk mengingatkan tentang kewajiban pembayaran dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini mencakup pengiriman surat pengingat, telepon, serta kunjungan langsung ke tempat kerja atau rumah nasabah. Selain itu, bank dapat melakukan negosiasi ulang terkait syarat dan ketentuan kredit, seperti restrukturisasi pinjaman atau perpanjangan jangka waktu pembayaran, untuk membantu nasabah kembali ke jalur yang benar dalam memenuhi kewajiban mereka.

Dengan upaya flagging dan collecting ini, diharapkan nasabah dapat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka, sehingga masalah kredit macet dapat diminimalkan. Bank juga terus melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan edukasi kepada nasabah tentang pentingnya menjaga komitmen dalam pembayaran kredit, agar hubungan antara bank dan nasabah tetap terjaga dengan baik dan sehat.

7. Bagaimana cara BPR DP Taspen Cabang Karawang dalam monitoring debitur Kredit Pegawai Aktif ASN ?

BPR DP Taspen Cabang Karawang memiliki metode yang komprehensif dalam melakukan monitoring terhadap debitur Kredit Pegawai Aktif ASN. Salah satu cara utama yang digunakan adalah melalui pemantauan Portofolio at Risk (PAR) yang dilakukan secara berkala pada sistem core banking. PAR adalah indikator yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas portofolio kredit bank, khususnya dalam mengidentifikasi kredit yang berisiko bermasalah.

Dalam proses monitoring ini, bank memanfaatkan data dan laporan yang dihasilkan oleh sistem core banking untuk memantau status pembayaran angsuran setiap debitur. Sistem ini memberikan informasi secara real-time mengenai keterlambatan pembayaran, jumlah tunggakan, dan umur piutang. Dengan demikian, bank dapat dengan cepat mendeteksi potensi masalah pada kredit yang diberikan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

Selain pemantauan melalui PAR, bank juga melakukan review dan evaluasi berkala terhadap portofolio kredit secara keseluruhan. Hal ini mencakup analisis tren pembayaran, identifikasi pola nasabah, dan penilaian ulang terhadap kelayakan kredit debitur. Bank juga mengadakan pertemuan rutin dengan tim manajemen risiko untuk membahas strategi penanganan kredit bermasalah dan mencari solusi yang efektif.

Melalui monitoring yang ketat dan terstruktur ini, BPR DP Taspen Cabang Karawang dapat memastikan bahwa debitur Kredit Pegawai Aktif ASN tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati, sehingga risiko kredit dapat diminimalkan dan kualitas portofolio kredit tetap terjaga.

8. Bagaimana kriteria kredit bermasalah menurut BPR DP Taspen ?

Menurut BPR DP Taspen, kriteria kredit bermasalah ditentukan berdasarkan status kelancaran pembayaran angsuran oleh debitur. Kredit dikategorikan sebagai bermasalah apabila mengalami status “non lancar”. Hal ini berarti debitur telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran mencapai jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh bank.

Secara lebih rinci, kriteria “non lancar” ini mencakup beberapa tingkatan keterlambatan pembayaran. Pada tahap awal, kredit dianggap “dalam perhatian khusus” jika pembayaran terlambat antara 1 hingga 90 hari. Jika keterlambatan berlangsung lebih dari 90 hari, kredit tersebut dikategorikan sebagai “kurang lancar”. Keterlambatan yang lebih parah, yaitu antara 180 hingga 270 hari, akan membuat kredit tersebut dianggap “diragukan”. Akhirnya, jika keterlambatan pembayaran melebihi 270 hari, kredit tersebut akan diklasifikasikan sebagai “macet”.

Kriteria ini digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat risiko yang dihadapi oleh bank terkait pinjaman yang diberikan. Penilaian ini juga membantu bank dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kredit, termasuk upaya penagihan yang lebih intensif, restrukturisasi pinjaman, atau tindakan hukum jika diperlukan. Dengan menerapkan kriteria ini, BPR DP Taspen dapat menjaga kualitas portofolio kreditnya dan meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

9. Kendala apa yang dihadapi ketika melakukan penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN ?

Dalam proses penyaluran Kredit Pegawai Aktif ASN, BPR DP Taspen Cabang Karawang menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah dalam aspek pengumpulan pembayaran atau koleksi (collecting). Kendala utama dalam collecting adalah kesulitan dalam memastikan bahwa angsuran pinjaman dibayar tepat waktu oleh para debitur. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan debitur untuk membayar, perubahan situasi keuangan, atau ketidakpatuhan terhadap jadwal pembayaran yang telah disepakati.

Selain itu, ada juga tantangan logistik dan administratif dalam mengelola proses penagihan. Bank harus memiliki sistem yang efisien untuk memantau status pembayaran setiap debitur, mengirimkan pengingat pembayaran, dan menindaklanjuti keterlambatan pembayaran. Proses ini memerlukan sumber

daya manusia yang cukup, serta teknologi yang mendukung untuk mengelola data dan komunikasi dengan debitur.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah resistensi dari debitur yang menghadapi masalah keuangan dan tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya. Dalam kasus seperti ini, bank perlu mengambil langkah-langkah tambahan seperti melakukan negosiasi ulang, menawarkan restrukturisasi pinjaman, atau bahkan mengambil tindakan hukum jika diperlukan.

10. Apakah ada cara untuk mengurangi risiko kredit bermasalah ?

Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, BPR DP Taspen Cabang Karawang menerapkan beberapa strategi mitigasi dan selektif terhadap calon debitur. Salah satu pendekatan utama adalah dengan melakukan mitigasi risiko, yang melibatkan identifikasi dan pengelolaan risiko-risiko potensial sebelum kredit disalurkan. Ini termasuk melakukan penilaian yang menyeluruh terhadap kemampuan pembayaran dan profil risiko calon debitur melalui analisis data keuangan, histori kredit, dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran.

Selain itu, bank juga menerapkan selektivitas yang ketat dalam proses penerimaan calon debitur. Hal ini berarti bank hanya akan menyetujui pengajuan kredit dari calon debitur yang memenuhi kriteria tertentu dan menunjukkan rekam jejak keuangan yang baik. Proses ini mencakup evaluasi menyeluruh atas kemampuan keuangan calon debitur, termasuk verifikasi pendapatan, pemeriksaan agunan, serta analisis risiko berdasarkan profil kredit mereka.

SURAT KETERANGAN RISET



PT BPR DP TASPEN
KANTOR CABANG KARAWANG

Jl. Ahmad Yani No.37 Bypass Tanjungpura, Karawang Barat, Karawang Telp : (0267) 845 0509

Karawang, 20 Juli 2023

Nomor : SRT- /DPTSP-K1.07/072023
Sifat : Penting
Lampiran : -

Kepada Yth.:

Ketua Prodi D4 Analisis Keuangan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Perihal : Pemberian Izin Mahasiswa Magang/Riset

Assalamualaikum wrwb

Berdasar surat yang telah kami terima dengan Nomor : 005k.323/Ket/20/Akd/VII/2023 tanggal surat 11 Juli 2023, Perihal Permohonan izin mahasiswa magang/riset atas nama mahasiswa :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	20213048	Salsabila Luthfiana Nursyifa	Analisis Keuangan

Bersama ini kami memberikan Izin pelaksanaan magang/riset dimaksud pada tanggal 11 September 2023 – 11 Maret 2024 di PT BPR DP TASPEN KC KARAWANG.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr wb.

PT BPR DP TASPEN
Branch Manajer

SABAR BAGIYO
Nik: 1172043

SURAT KETERANGAN HASIL PINDAI UJI KEMIRIPAN NASKAH



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Parladireja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883037, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 1057/Ka.Div/10/Div.PP/VIII/2024

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Salsabila Luthfiana Nursyifa**
Nomor Mahasiswa : **20213048**
Dosen Pembimbing : **Ahmad Rifqi Hidayat, S.IP., M.M.**
Program Studi : **Analisis Keuangan**
Judul Karya Ilmiah : **Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit
Pegawai Aktif Pada PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang
Karawang**
Nomor Hp : **081290864512**

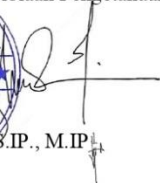
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **13% (Tiga Belas Persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (Dua Puluh Persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 12 Agustus 2024

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,


Suwardi S.IP., M.IP.

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Salsabila Luthfiana Nursyifa, lahir pada tanggal 6 Januari 2002 merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari orang tua yang bernama Bapak Uus Jaenusuari dan Ibu Yeyen Hendayani. Penulis bertempat tinggal di Perum Karaba Indah, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SDN Karawang Kulon II pada tahun (2007 – 2013), melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 6 Karawang Barat pada tahun (2014-2016), dan kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Telukjambe Timur Karawang pada tahun (2017-2020). Penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, dimulai pada tahun 2020.

Untuk menyelesaikan studi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, penulis mempersembahkan penulisan skripsi dengan judul **“Evaluasi Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Pegawai Aktif Pada PT. BPR DP Taspen Kantor Cabang Karawang”**.

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Dokumentasi

